

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada dipaling ujung utara nusantara ini menjadi Provinsi Daerah Tingkat I. Sejarah Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara seperti halnya sejarah Provinsi-Provinsi lainnya di Pulau Sulawesi telah beberapa kali mengalami perubahan administrasi pemerintahan, sebagaimana terekam dalam jejak perundangan yang menjadi dasar pembentukan daerah, sebagai berikut:

- 1) Pada permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia, Sulawesi Utara berstatus Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan–Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara–Tengah;
- 2) Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960;
- 3) Otonomisasi Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ini secara *de facto* baru dimulai sejak terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tanggal 26 Desember 1961;
- 4) Pada tanggal 23 September 1964, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, yang menetapkan perubahan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Undang-undang tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai Ibukota. Momentum diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 ini, kemudian dipatri sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 5) Dalam perjalanan panjang sampai dengan Tahun 2000, Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 Kotamadaya yaitu : Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, Boalemo serta Kotamadya Manado, Bitung dan Gorontalo;
- 6) Selanjutnya seiring dengan Nuansa Reformasi dan Otonomi Daerah, maka telah dilakukan Pemekaran Wilayah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan demikian, Wilayah Provinsi Sulawesi Utara setelah pemekaran Provinsi meliputi : Kabupaten Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado dan Kota Bitung;
- 7) Gaung reformasi ini terus berlanjut di era otonomi daerah dibawah payung Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Terhitung, Provinsi Sulawesi Utara kembali menambah jumlah

Kabupaten/Kota Baru yang dimekarkan, yaitu Kabupaten Talaud berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 serta Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003;

- 8) Empat tahun kemudian, wilayah administrasi pemerintahan Sulawesi Utara kembali mengalami ketambahan 4 (empat) Kabupaten/Kota baru, yakni Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007, Kab. Bolmong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 dan Kab. Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007;
- 9) Pada tahun 2008 Provinsi Sulawesi Utara ketambahan lagi 2 (dua) Kabupaten baru, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008, sehingga demikian sampai dengan saat ini, Provinsi Sulawesi Utara memiliki 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota sebagai daerah otonom.

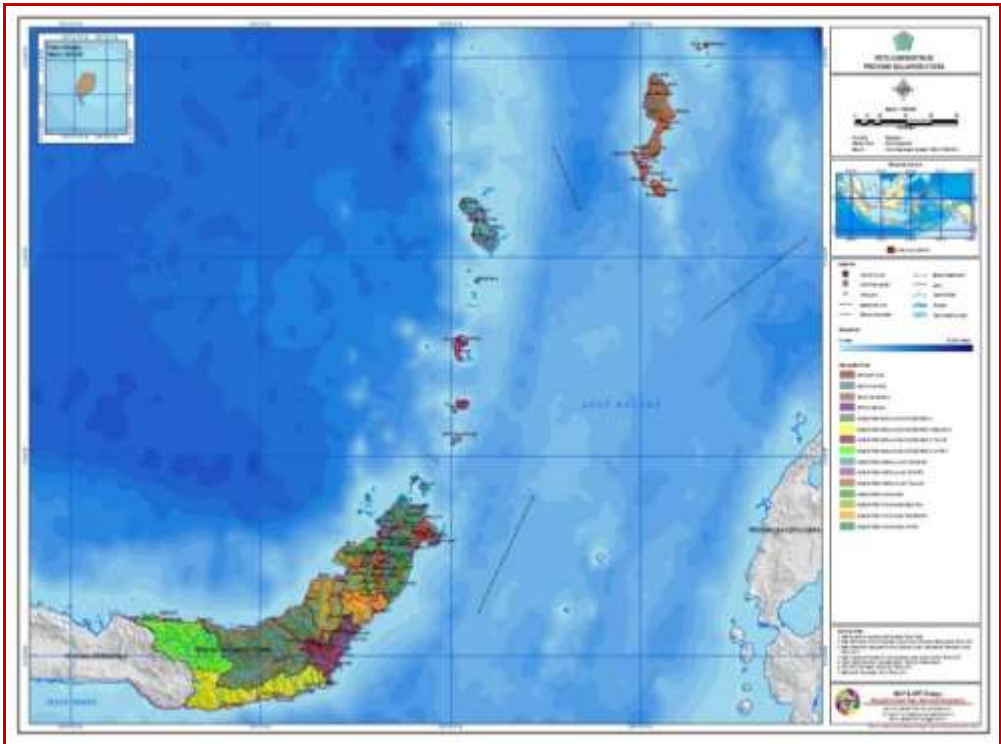
b. Data Geografis Wilayah

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 00°15’ – 05°34’ Lintang Utara dan antara 123°07’ – 127°10’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Negara Filipina dan Samudera Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 13,892.47 km² yang terbagi atas 11 kabupaten dan 4 kota. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 2,871.65 km² atau 20,67 persen dari wilayah Sulawesi Utara.

Gambar 1.1: Peta Provinsi Sulawesi Utara



Sulawesi Utara adalah Provinsi Kepulauan dengan ibukota Manado. Provinsi ini terdiri dari 15 kabupaten/kota (11 kabupaten yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Utara serta 4 kota, yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon).

Tabel 1.1: Luas Daerah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/kota Tahun 2022

NO	KAB/KOTA	LUAS (KM2)	Persen LUAS WILAYAH (%)	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN
1	Kab. Minahasa	1.128,45	7,78	15	234
2	Kab. Minahasa Selatan	1.456,69	10,05	17	131
3	Kab. Minahasa Utara	995,55	6,87	10	72
4	Kab. Minahasa Tenggara	753,14	5,19	12	153
5	Kab. Bolmong	3.269,30	22,55	15	178
6	Kab. Bolmong Utara	1.644,37	11,34	6	131
7	Kab. Bolmong Selatan	1.796,07	12,39	6	107
8	Kab. Bolmong Timur	859,97	5,93	10	93
9	Kab. Kep. Sangihe	597,26	4,12	12	144
10	Kab. Kep. Talaud	1.012,14	6,98	7	81
11	Kab. Kep. Sitaro	217,29	1,50	10	81
12	Kota Manado	162,35	1,12	11	87
13	Kota Bitung	329,72	2,27	8	69
14	Kota Tomohon	169,06	1,17	5	44
15	Kota Kotamobagu	108,89	0,75	4	33
JUM	14.500,28	14.500,25	100	1840	1638

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Jumlah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2017-2022 tidak mengalami perubahan yaitu 171 kecamatan, dengan jumlah 1.838 desa/kelurahan tahun 2016-2018 dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 1.840 desa/kelurahan (bertambah 1 desa di Kabupaten Minahasa Selatan).

b) Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis letak Provinsi Sulawesi Utara sangat strategis karena berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur (Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, ASEAN) dan Pasifik yang menjadikan Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional. Kondisi ini menciptakan iklim yang menarik bagi para wisatawan, pelaku bisnis, dan para investor domestik dan internasional untuk berkunjung dan melakukan investasi di Sulawesi Utara.

Posisi Provinsi Sulawesi Utara terletak di tepian Samudra Pasifik, diapit oleh 2 (dua) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang melewati Selat Makassar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, dan ALKI III yang melewati Laut Maluku antara Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku Utara dan Maluku. Posisi strategis ini menciptakan keunikan dan keunggulan khusus bagi Sulawesi Utara karena sangat dekat dengan pasar Asia Timur dan Pasifik.

Potensi pengembangan wilayah Sulawesi Utara dikembangkan lewat strategi pengembangan klaster yang terdiri dari 5 klaster yaitu: Klaster Wilayah Kepulauan, Klaster Wilayah Bolaang Mongondow Raya, Klaster Wilayah Minahasa Raya (Selatan, Tenggara, Tengah/ Induk, dan Tomohon), Klaster Wilayah Minahasa Raya Bagian (Utara, Manado, dan Bitung) sebagai wilayah cepat tumbuh, dan pembangunan antar Klaster Wilayah Minahasa Raya dan Bolaang Mongondow Raya dalam koridor pantai Selatan.

c) Topografi

Dilihat dari topografi Sulawesi Utara sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk dataran. Terdapat 46 gunung yang terletak di sembilan kabupaten/kota. Sedangkan jumlah danau tercatat sebanyak 17 danau dan jumlah sungai yang mengalir di wilayah Sulawesi Utara sebanyak 30 sungai. Gunung-gunung terletak berantai dengan ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut.

Beberapa gunung di Sulawesi Utara yaitu, Gunung Klabat (1.895 m) di wilayah Airmadidi, Gunung Lokon (1.579 m) dan Gunung Mahawu (1.331 m) di wilayah Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di wilayah Tombatu, Gunung Dua Saudara (1.468 m) (wilayah Bitung), Gunung Awu (1.784 m) di wilayah Kepulauan Sangihe, Gunung Ruang (1.245 m) dan Gunung Karangetan (1.320 m) di wilayah Kepulauan Sitaro, Gunung Dalace (1.165 m) di wilayah Minahasa, Gunung Ambang (1.689 m) di wilayah Bolaang Mongondow, Gunung Gambula (1.954 m) di wilayah Bolaang Mongondow Utara, dan Gunung Batu-Balawan (1.970 m) di wilayah Bolaang Mongondow Timur.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang potensial mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran yang terdapat di daerah ini antara lain: Tondano (2.850 Ha), Langowan (2.381 Ha), Modinding (2.350 Ha), Tompaso Baru (2.587 Ha) di Kabupaten Minahasa serta beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

d) Geologi

Kekayaan geologi yang sangat unik di miliki Provinsi Sulawesi Utara terjadi akibat keberadaan tumbukan antara 2 (dua) *island arc* (Sangihe dan Halmahera) yang menumpang di atas lempeng laut Maluku, sementara di tempat-tempat lain di bagian dunia ini lempeng benua bertumbukan dengan lempeng samudera. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara memiliki keunggulan geologi yang unik untuk dijadikan daya tarik wisata tetapi juga sebagai pusat studi keilmu-bumian dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan peta geologi bersistem Indonesia (1:250.000), struktur geologi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari formasi sebagai berikut:

- Qal (Aluvium): terdapat dipesisir pantai seperti di Nanasi, Boyongpante, Sidate dan Tawaang, serta di daerah sepanjang Pantai Utara Bolaang Mongondow seperti Boroko, Bolangitang, Biontong, Batulintik, Lolak dan

Lolan. Di Kota Manado zona ini terdapat di Pantai Tumumpa dan di pantai bagian utara Manado;

- Qs (Endapan Danau dan Sungai): terdapat di daerah sepanjang sungai (DAS) Tondano dari Kairagi sampai ke muara Sungai Tondano, daerah pesisir Likupang dan pesisir Tanawangko-Tumpaan;
- Ql (Batu gamping Terumbu Koral): terdapat di antara daerah pasang naik dan pasang surut (di barat Amurang dan di Pulau Siladen);
- Qv (Batuan Gunung Api Muda): membentuk Gunung Api Strato Muda, antara lain, Gn. Sopotan, Gn. Mahawu, Gn. Lokon, Gn. Klabat, Gn. Tangkoko;
- Qtv (Tufa Tondano): tersebar di daerah Manado, sekitar jalur jalan Tanahwangko–Amurang, daerah sekitar Gn. Lolombulan di Kecamatan Tenga dan Sinonsayang;
- Qtvl (Aliran lava berkomposisi andesit trakhit): terdapat di daerah Gn. Tanuwatik, Gn. Popontolen dan di S. Sinengkeian. Di daerah pantai antara Sondaken dan Paslaten;
- Tps (Breksi dan Batu Pasir): terdapat di P. Nain Besar dan P. Nain Kecil, P. Talise, P. Bangka juga sekitar Likupang Barat dan Likupang Timur;
- Tmv/Tmvl (Batuan Gunung Api): terdapat di sungai dekat Paslaten, P. Lembeh, Papusungan, di daerah Bolaang Mongondow terletak di daerah G. Ulutalagon – G. Bumbungan;
- Tms (Batuan Sedimen): terdapat di Kotamobagu;
- Ttv (batuan Gunung Api): Satuan ini terdapat di daerah Bolaang Mongondow dan di daerah Bintauna;
- Tts (Formasi Tinombo Ahlburg 1913): Satuan batuan ini terdapat di Bolangitang dan Kaidipang;
- Qa (Aluvium): Dataran alluvium yang luas terdapat di Tabukan Utara;
- Qhav (Batuan Gunung Api Awu) Batuan dihasilkan oleh Gunung Api Awu di P. Sangihe. Endapan awan panas meliputi daerah sekitar kawah, lembah dan beberapa pantai seperti Mitung dan Bahu. Formasi geologi lainnya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe-Sitaro dan Talaud adalah Qhkv batuan Gunung Api Karangetang, Qhrv batuan Gunung Api Ruang, Qpp formasi Pintareng, Qtsv batuan Gunung Api Sahendaruman, Qtkv batuan Gunung Api Kalama, QTtv batuan Gunung Api Tamata, QTmv batuan Gunung Api Malingge, Qti batuan terobosan, Tpbv batuan Gunung Api Bukide, dan Tnbv batuan Gunung Api Biaro.

e) Hidrologi

Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Sungai:

- Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas (Wilayah Sungai Strategis Nasional);
- Wilayah Sungai Dumoga Sangkub (Wilayah Sungai Lintas Propinsi); dan
- Wilayah Sungai Poigar-Ranoyapo (Wilayah Sungai Lintas Kabupaten).

Secara garis besar luas SWP DAS Sulawesi Utara adalah 1.423.047 ha. Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 23 Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang terbagi dalam 66 SWP SUBDAS- dengan luas 1.423.047 ha. SWP DAS sangat berperan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Terdapat 16 (enam belas) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu: DAS Tondano, DAS Kosibidan, DAS Sangkup, DAS Ranoyapo, DAS Pororosen, DAS Poigar, DAS Ongkak Mongondow, DAS Nuangan, DAS Ranowangko/Nimangan, DAS Likupang, DAS Buyat, DAS Bolangitang, DAS Ayong, DAS Andegile, DAS Dumoga dan DAS Bone (berdasarkan Peta Pembagian DAS Sulawesi Utara).

Sebagai prasarana penunjang bagi kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan lahan basah atau persawahan, pengembangan sistem irigasi pada dasarnya mengikuti potensi pengembangan/perluasan daerah persawahan. Proyek-proyek irigasi yang relatif besar ada di Daerah Irigasi Kasinggolan-Toraut, Daerah Irigasi Dumoga, Daerah Irigasi Sangkup, Daerah Irigasi Ayong-Bolangat dan Daerah Irigasi Lolak.

Tabel 1.2: Luas SWP DAS Provinsi Sulawesi Utara

NO.	SATUAN WILAYAH PENGELOLAAN DAS	LUAS (ha)	persen
1.	Buyat	87.909	6.18
2.	Dumoga Mongondow	204.736	14.39
3.	Essang	79.737	5,60
4.	Kep. Nanusa	3.954	0.28
5.	Kep. Nusa Tabukan	1.205	0.08
6.	Kep. Tatoareng	2.200	0.15
7.	Likupang	97.951	6.88
8.	Mahena	50.852	3.57
9.	Molibagu	116.167	8.16
10.	P. Biaro Ds	2.726	0.19
11.	P. Bunaken Ds	4.891	0.34
12.	P. Kabaruan	10.940	0.77
13.	P. Lembeh	5.767	0.41
14.	P. Lirung	11.272	0.79
15.	P. Siau Ds	13.905	0.98
16.	P. Tagulandang Ds	7.897	0.55
17.	P. Talise Ds	7.476	0.53
18.	Poigar	81.520	5.73
19.	Ranoyapo	87.154	6.12
20.	Ratahan Pantai	98.754	6.94
21.	Sangkup Langi	287.019	20.17
22.	Tondano	54.124	3.80
23.	Tumpaan	104.891	7.37
JUMLAH		1.423.047	100

Sumber: RTRW Prov. SULUT Tahun 2014-2034

f) Klimatologi

➤ Suhu

Rata-rata temperatur di Provinsi Sulawesi Utara sepanjang tahun 2021 adalah 27,4°C sedangkan suhu udara kering sekitar iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muzon. Pada bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara. Pada bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Pada umumnya, kondisi iklim di Sulawesi Utara sama dengan kondisi iklim wilayah Indonesia lainnya, yaitu memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan.

Sebagai daerah yang beriklim hujan tropis, kelembaban udara terendah di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado yaitu 66 persen dan kelembaban tertinggi di Kabupten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa yaitu 90 persen. Secara keseluruhan kelembaban rata-rata mencapai 80,8 persen.

Tabel 1.3: Keadaan Rata-rata Suhu di Sulut Tahun 2021 (Derajat Celcius)

KABUPATEN/KOTA	STASIUN BMKG	SUHU/TEMPERATUR (°C)		
		MINI MUM	RATA -RATA	MAKSI MUM
Kabupaten				
1. Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	--	--	--
2. Minahasa	Tondano	17,4	23,1	31,4
3. Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	21,6	27,6	35,0
4. Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	--	--	--
5. Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	--	--	--
6. Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	21,4	26,5	35,8
7. Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	--	--	--
8. Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	--	--	--
9. Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	--	--	--
10. Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	--	--	--
11. Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	--	--	--
Kota				
1. Manado	Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi	20,4	27,0	35,0
2. Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	22,0	28,4	34,8
3. Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	--	--	--
4. Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	--	--	--

Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022

➤ Curah Hujan

Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2000-3000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Kabupaten Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan curah hujan rata-rata adalah 279,6 mm dengan sebaran 220-309 mm. Kecepatan angin rata-rata adalah 2,7 knot dengan sebaran 1,9-3,6 knot.

Tabel 1.4: Keadaan Curah Hujan di Provinsi Sulawesi Utara (Milimeter Kubik (mm³)) Tahun 2022

KABUPATEN/ KOTA	STASIUN BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			JMLH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYINA RAN MATAHA RI (persen)
		MIN.	RATA- RATA	MAX			
Bolaang Mongondow	Pos Hujan KC Motabang Lolak	-	-	-	-	-	-
Minahasa	Tondano	-	-	-	2306	245	47

KABUPATEN/ KOTA	STASIUN BMKG	TEKANAN UDARA (MB)			JMLH CURAH HUJAN (MM)	JUMLAH HARI HUJAN (HARI)	PENYINA RAN MATAHA RI (persen)
		MIN.	RATA- RATA	MAX			
Kepulauan Sangihe	Stasiun Meteorologi Naha	-	-	-	4678	262	61
Kepulauan Talaud	Pos Hujan BPP Beo	-	-	-	-	-	-
Minahasa Selatan	Pos Hujan UPP Tenga	-	-	-	-	-	-
Minahasa Utara	Stasiun Klimatologi Minahasa Utara	-	-	-	4603	281	51
Bolaang Mongondow Utara	Pos Hujan BPP Pinogaluman	-	-	-	-	-	-
Siau Tagulandang Biaro	Pos Hujan BPP Siau Tengah	-	-	-	-	-	-
Minahasa Tenggara	Pos Hujan UPTD Ratahan	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Selatan	Pos Hujan UPTD Pinolosian	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Timur	Pos Hujan UPP Kotabunan	-	-	-	-	-	-
Manado	Stasiun Meteorolgi Sam Ratulangi	-	-	-	4177	275	58
Bitung	Stasiun Meteorologi Maritim Bitung	-	-	-	2340	240	61
Tomohon	Pos Hujan BPP Tomohon	-	-	-	-	-	-
Kotamobagu	Pos Hujan BPP Mongkonai	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Prov. Sulut, 17 Februari 2022.

g) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun jenis penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5: Penggunaan Lahan Di Provinsi Sulawesi Utara

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	persentase (persen)
1	Kawasan Lindung	406.949	29,38
1.1	Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	245.165	17,70
1.2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	161.784	11,68
2	Kawasan Budidaya	978.215	70,62
2.1	Pertanian Lahan Basah (Sawah)	107.361	7,75
2.2	Perkebunan	301.600	21,77
2.3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	208.927	15,08
2.4	Kawasan Hutan Produksi (HP)	64.367	4,65
2.5	Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	14.696	1,06
2.6	Areal Penggunaan Lain (APL)	281.264	20,31
TOTAL		1.385.164	100

Sumber: Bappeda Prov. Sulut

➤ Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Utara seluas 406.949 ha, meliputi:

- Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam (KSA) di Sulawesi Utara terdiri dari: a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi: 1. SA Laut Selat Lembeh di Kota Bitung; 2. SA Laut Sidat di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan. b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi: 1. SM Gunung Manembo-nembo, di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Selatan; 2. SM Karakelang Utara-Selatan di Kepulauan Talaud. c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi: 1. CA Dua Saudara, di Kota Bitung; 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Kota Bitung; 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow; 4. CA Gunung Lokon di Kota Tomohon.

Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB) di Provinsi Sulawesi Utara seluas 12.036,29 ha meliputi Kawasan Pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg. Pisok di Kabupaten Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kabupaten Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, HB Tg. Kelapa, HB Tg. Walintau, HB Bentenan di Kabupaten Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongodow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Kabupaten Minahasa Utara.

Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Kota Manado, di Kabupaten Minahasa, di Kabupaten Minahasa Selatan dan di Kabupaten Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Kota Bitung dan TWA Batu Angus, di Kota Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi: rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Kabupaten Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.

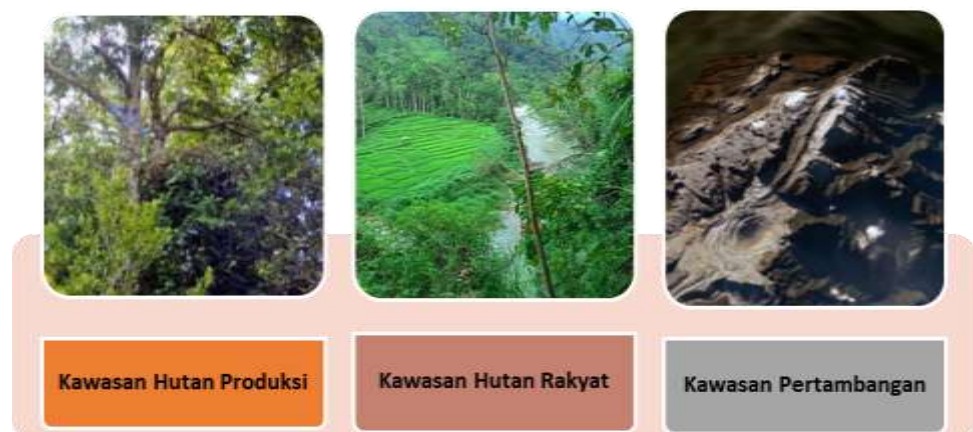
Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi: 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi

Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Kota Manado, di Kabupaten Minahasa, di Kabupaten Minahasa Selatan dan di Kabupaten Minahasa Utara. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Kota Bitung dan TWA Batu Angus, di Kota Bitung; Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Kabupaten Minahasa; Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa di Kota Manado.

- Kawasan hutan lindung seluas 161.784 ha

Kawasan Hutan Lindung di Provinsi Sulawesi Utara tersebar di: a. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu; b. Minahasa; c. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara; d. Minahasa Utara; e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; f. Kepulauan Talaud; g. Bitung; h. Manado, meliputi bakau dan darat; i. Tomohon.

➤ Kawasan Budi Daya



Penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, kawasan budidaya dengan luasan 978.215 ha meliputi:

- Kawasan Pertanian Lahan Basah (Sawah)

Kawasan Pertanian Lahan Basah di Provinsi Sulawesi Utara seluas 107.361 ha dengan persentase terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Kawasan Perkebunan

Luas Kawasan perkebunan di Sulawesi Utara adalah 301.600 Ha, yang didominasi oleh perkebunan kelapa, cengkih dan pala.

- Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Luas Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara seluas 208.927 ha meliputi: HPT Salibabu I dan II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat, HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile – Sungai Gambuta – Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga – Sungai Salongo – Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow.

- Kawasan Hutan Produksi (HP)

Meliputi HP Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I dan II, Sungai Pililahunga – Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow.

- Kawasan Hutan yang dapat dikonversi

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.696 ha dari luas wilayah Provinsi. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis. Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara.

- Areal Penggunaan Lain (APL)

Areal Penggunaan Lain di Provinsi Sulawesi Utara seluas 281.264 ha terdiri atas: kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan serta beberapa jenis kawasan lain yang ada.

2) Wilayah Rawan Bencana

Secara umum wilayah Sulawesi Utara rawan bencana karena berada di area *ring of fire*. Kawasan rawan bencana alam Provinsi Sulawesi Utara terbagi atas:

- a) Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan yang berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar;
- b) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi: 1. Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur; 2. Manado: Kecamatan Wanea, Kecamatan Singkil, Kecamatan Tuminting, Kecamatan

- Tikala, Kecamatan Mapanget, Kecamatan Bunaken, Kecamatan Malalayang, dan Kecamatan Wenang; 3. Jalur jalan Manado-Amurang; 4. Jalur jalan Manado-Tomohon; 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara); dan 6. Torosik (Bolaang Mongondow Selatan);
- c) Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah;
- d) Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa; dan
- e) Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Sulawesi Utara berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2023 berjumlah 2,660,415 jiwa. Kota Manado merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Utara dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2023 sebanyak 463.615 jiwa, disusul oleh Kabupaten Minahasa sebanyak 345.973 jiwa, dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 254.945 jiwa. Selanjutnya jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2023 menurut komposisi penduduk per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.6 : Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

NO	KODE WILAYAH	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PENDUDUK		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	71	PROVINSI SULAWESI UTARA			
1	71,01	BOLAANG MONGONDOW	132.717	122.228	254.945
2	71,02	MINAHASA	176.685	169.288	345.973
3	71,03	KEPULAUAN SANGIHE	70.216	67.613	137.829
4	71,04	KEPULAUAN TALAUD	52.076	49.064	101.140
5	71,05	MINAHASA SELATAN	125.190	116.582	241.772
6	71,06	MINAHASA UTARA	114.402	111.424	225.826
7	71,07	MINAHASA TENGGARA	62.354	57.997	120.351
8	71,08	BOLAANG MONGONDOW UTARA	44.829	42.472	87.301
9	71,09	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	35.789	35.244	71.033
10	71.10	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	47.376	43.411	90.787
11	71.11	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	38.464	35.808	74.272
12	71.71	KOTA MANADO	232.751	230.864	463.615
13	71.72	KOTA BITUNG	111.986	107.077	219.063
14	71.73	KOTA TOMOHON	52.003	50.721	102.724
15	71.74	KOTA KOTAMOBAGU	63.551	60.233	123.784
		Total Jumlah Penduduk Sulawesi Utara	1.360.389	1.300.026	2.660.415

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 11 Kabupaten dan 4 Kota yang terdiri dari:

Tabel 1.7 : Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara

NO	KABUPATEN / KOTA
	PROVINSI SULAWESI UTARA
1	BOLAANG MONGONDOW
2	MINAHASA
3	KEPULAUAN SANGIHE
4	KEPULAUAN TALAUD
5	MINAHASA SELATAN
6	MINAHASA UTARA
7	MINAHASA TENGGARA
8	BOLAANG MONGONDOW UTARA
9	KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
10	BOLAANG MONGONDOW TIMUR
11	BOLAANG MONGONDOW SELATAN
12	KOTA MANADO
13	KOTA BITUNG
14	KOTA TOMOHON
15	KOTA KOTAMOBAGU

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diuraikan pada tabel-tabel berikut ini:

- 1) Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Tabel 1.8: Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

NO.	NAMA INSTANSI
1	2
1	SEKRETARIAT DAERAH (TERMASUK STAF AHLI) TIPE A
A	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Biro Kesejahteraan Rakyat
3	Biro Hukum
B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1	Biro Perekonomian
2	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Biro Administrasi Pembangunan
C	Asisten Administrasi Umum
1	Biro Organisasi
2	Biro Umum
3	Biro Administrasi Pimpinan
2	SEKRETARIAT DPRD TIPE C
3	INSPEKTORAT DAERAH TIPE A
1	Inspektur
4	DINAS PENDIDIKAN DAERAH TIPE A
	UPTD
4.1	UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kelas A

NO.	NAMA INSTANSI
	CABANG DINAS
4.2	Cabang Dinas Talaud Kelas A
4.3	Cabang Dinas Sangihe Kelas A
4.4	Cabang Dinas Siau Tagulandang Biaro Kelas A
4.5	Cabang Dinas Minahasa Utara dan Bitung Kelas A
4.6	Cabang Dinas Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara Kelas A
4.7	Cabang Dinas Tomohon- Minahasa Kelas A
4.8	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Kelas A
4.9	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Utara Kelas A
4.10	Cabang Bolaang Mongondow Timur dan Kota Kotamobagu Kelas A
4.11	Cabang Dinas Bolaang Mongondow Selatan Kelas A
5	DINAS KESEHATAN DAERAH TIPE A
	UPTD
5.1	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B
5.2	UPTD Rumah Sakit Khusus Mata
5.3	UPTD Rumah Sakit Tipe C Noongan
5.4	UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah
5.5	UPTD Rumah Sakit Manembo-Nembo Tipe C Bitung
5.6	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
5.7	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A
6	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG DAERAH TIPE A
	UPTD
6.1	UPTD Wilayah I Manado, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bitung, Tomohon Kelas A
6.2	UPTD Wilayah II Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur dan Kotamobagu Kelas A
6.3	UPTD Wilayah III Sitaro dan Sangihe Kelas A
6.4	UPTD Wilayah IV Talaud Kelas A
6.5	UPTD Balai Bina Teknik Kelas A
6.6	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian Kelas A
6.7	UPTD Air Minum Kelas A
6.8	UPTD Persampahan Kelas A
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH TIPE A
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH TIPE A
9	DINAS SOSIAL DAERAH TIPE A
	UPTD
9.1	UPTD Balai Penyantunan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Senja Cerah"
9.2	UPTD Balai Penyantunan Sosial Anak dan Remaja Terlantar "Makaaruyen"
10	DINAS TENAGA KERJA DAERAH TIPE A
	UPTD
10.1	UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja Kelas A
10.2	UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TIPE A
	UPTD
11.1	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A
12	DINAS PANGAN DAERAH TIPE A
	UPTD

NO.	NAMA INSTANSI
12.1	UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TIPE A
14	DINAS KEPENDUDUKAN, CAPIL DAN KB DAERAH TIPE A
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH TIPE A
16	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH TIPE A
	UPTD
16.1	UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A
17	DINAS KOMINFO, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH TIPE B
18	DINAS KOPERASI, UKM DAERAH TIPE A
	UPTD
18.1	UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kelas A
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH TIPE A
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH TIPE A
21	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH TIPE C
	UPTD
21.1	UPTD Taman Budaya dan Museum Kelas A
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TIPE A
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH TIPE A
	UPTD
23.1	UPTD Perbenihan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan Kelas B
23.2	UPTD Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Bitung Kelas A
23.3	UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah I (Sangihe, Sitaro, Talaud) Kelas A
23.4	UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah II (Mitra) Kelas A
23.5	UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III (Bitung, Minut, Minahasa, Minsel dan Tomohon) Kelas A
23.6	UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV (Bolmong, Kotamobagu, Bolmut, Bolsel, Boltim) Kelas A
23.7	UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa Kelas A
24	DINAS PARIWISATA DAERAH TIPE A
25	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH TIPE A
	UPTD
25.1	UPTD Balai Perlindungan dan Pengujian Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A
25.2	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A
25.3	UPTD Balai Pengembangan Bibit Ternak dan Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Utara Kelas A
25.4	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A
25.5	UPTD Balai Pelatihan Teknis Pertanian Kelas A
26	DINAS KEHUTANAN DAERAH TIPE A
	UPTD
26.1	UPTD Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam Kelas A
26.2	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit I Bolmong dan Bolmut Kelas A
26.3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit II Boltim dan Bolsel Kelas A
26.4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit III Sangihe, Talaud dan Sitaro Kelas A
26.5	UPTD Model Unit IV Poigar (Poigar Bolaang Mongondow dan Poigar Minahasa) Kelas A

NO.	NAMA INSTANSI
26.6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit V (Minahasa, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan dan Tomohon) Kelas A
26.7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit VI (Manado, Minut dan Bitung) Kelas A
26.8	UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa H. V. Worang Kelas A
27	DINAS ESDM DAERAH TIPE A
	UPTD
27.1	UPTD Balai Pengujian dan Peralatan Pertambangan Kelas A
27.2	Cabang Dinas Wilayah I (Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Tomohon) Kelas A
27.3	Cabang Dinas Wilayah II (Manado, Minut, Bitung) Kelas A
27.4	Cabang Dinas Wilayah III (Bolmong, Bolmut, Boltim, Bolsel, dan Kota Kotamobagu) Kelas A
27.5	Cabang Dinas Wilayah IV (Sangihe, Talaud, Sitaro) Kelas A
28	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH TIPE A
	UPTD
28.1	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A
29	DINAS PERKEBUNAN DAERAH TIPE A
	UPTD
29.1	UPTD Balai Pengujian, Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
29.2	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A
30	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH TIPE A
31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE A
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH TIPE A
	UPTD
32.1	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Manado Kelas A
32.2	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Minahasa Kelas A
32.3	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bitung Kelas A
32.4	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tomohon Kelas A
32.5	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Minsel Kelas A
32.6	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Minut Kelas A
32.7	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Mitra Kelas A
32.8	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bolmong, Bolmut dan Boltim Kelas A
32.9	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kotamobagu dan Bolsel Kelas A
32.10	UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sangihe, Talaud dan Sitaro Kelas A
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TIPE A
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TIPE A
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TIPE C
36	BADAN PENGHUBUNG DAERAH
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
39	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH TIPE A

Sumber data: Biro Organisasi Setda Prov. Sulut

2) Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Jumlah Pegawai pada Pemerintah Provinsi Sulaweis Utara sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 1.9: Jumlah Pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN											TOTAL	
		SD	SMP	SMA/ SMK/MA	Total Pendidikan SMA ke bawah	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3		Total Pendidikan Perguruan Tinggi
1	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI				0						5	2	7	7
2	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN			5	5			1	13	10	7		31	36
3	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			4	4			1	2	14	8		25	29
4	BIRO HUKUM			4	4				3	18	7	1	29	33
5	BIRO PEREKONOMIAN			4	4			2	1	15	9		27	31
6	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			6	6				6	9	4		19	25
7	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			2	2			1	3	14	9		27	29
8	BIRO ORGANISASI			5	5				6	12	4		22	27
9	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			8	8			3	2	47	11		63	71
10	BIRO UMUM	1		37	38			4	21	20	8		53	91
11	INSPEKTORAT DAERAH			4	4			3	6	88	45	2	144	148
12	SEKRETARIAT DPRD			22	22		1	5	3	34	8		51	73
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1		5	6			1	36	38	23	3	101	107
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10	10				5	17	6		28	38
15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			15	15			2	4	25	7		38	53
16	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH			8	8			3	5	13	29	3	53	61
17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				0			1	1	16	10	2	30	30
18	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			19	19		1	7	11	41	24		84	103
19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			6	6			6	6	31	15		58	64
20	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			4	4		1	3	4	16	10		34	38
21	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA			5	5	1		1	2	20	2		26	31
22	BADAN PENDAPATAN DAERAH			11	11			14	4	25	16		59	70
23	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN MANADO			13	13			8		12	1		21	34
24	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN MINAHASA			7	7				1	14	3		18	25
25	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BITUNG			6	6			1	1	9			11	17
26	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN SANGIHE, TALAUD, SITARO			8	8			1		10	2		13	21
27	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KOTAMOBAGU, BOLSEL			2	2			3		10	2		15	17
28	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN TOMOHON			5	5			2		10	1		13	18
29	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN MINAHASA SELATAN			6	6			3		7	1		11	17
30	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN MINAHASA UTARA			3	3			4		8	5		17	20
31	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN MINAHASA TENGGARA			2	2			3		7	1		11	13
32	UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BOLMONG, BOLMUT, BOLTIM			3	3			4	1	9	1		15	18
33	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH			16	16			1	1	41	3		46	62

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN										TOTAL		
		SD	SMP	SMA/ SMK/MA	Total Pendidikan SMA ke bawah	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2		S3	Total Pendidikan Perguruan Tinggi
34	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH			6	6			1	1	25	5		32	38
35	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH			12	12			1	5	25	4		35	47
36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH			3	3				3	23	5		31	34
37	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH			10	10		1	2	4	29	12		48	58
38	DINAS PARIWISATA DAERAH			8	8			4	2	28	12	2	48	56
39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH			4	4			11	4	30	9		54	58
40	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			3	3			4	5	18	10		37	40
41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH			11	11				1	31	12		44	55
42	DINAS KESEHATAN DAERAH		1	23	24			33	17	76	42		168	192
43	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN			35	35	1		139	10	72	61		283	318
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			11	11	1		155	43	63	87		349	360
45	RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. V. L. RATUMBUYSANG			25	25	1		116	6	100	39		262	287
46	RUMAH SAKIT MANEMBO-NEMBO BITUNG			15	15	2		83	22	60	27		194	209
47	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA			4	4			45	4	71	31		151	155
48	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN			6	6			19		17	4		40	46
49	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN			10	10			1	1	4	4		10	20
50	DINAS PENDIDIKAN DAERAH		1	50	51		2	18	12	953	115	4	1104	1155
51	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN			2	2					12	2		14	16
52	CABANG DINAS PENDIDIKAN SANGIHE			14	14			4		441	11		456	470
53	CABANG DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW			6	6		3	2	1	366	8		380	386
54	CABANG DINAS PENDIDIKAN TALAUD		2	41	43	1	1	8	1	529	19		559	602
55	CABANG DINAS PENDIDIKAN SITARO			7	7			4	1	226	6		237	244
56	CABANG DINAS PENDIDIKAN MINAHASA UTARA, BITUNG			15	15		1	10	2	737	44		794	809
57	CABANG DINAS PENDIDIKAN MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA		1	12	13		1	10	2	1042	42		1097	1110
58	CABANG DINAS PENDIDIKAN TOMOHON, MINAHASA			19	19		1	8	3	1076	64		1152	1171
59	CABANG DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, KOTAMOBAGU			14	14			2	3	604	28		637	651
60	CABANG DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW UTARA			2	2			3	1	204	7		215	217
61	CABANG DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN			3	3			2		133	5		140	143
62	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DAERAH			11	11			2	1	16	3		22	33

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN												TOTAL
		SD	SMP	SMA/ SMK/MA	Total Pendidikan SMA ke bawah	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3	Total Pendidikan Perguruan Tinggi	
63	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN PERTAMBANGAN KELAS A			4	4					2	2		4	8
64	CABANG DINAS WILAYAH I MINAHASA, MINAHASA SELATAN, MINAHASA TENGGARA DAN TOMOHON			2	2					3	2		5	7
65	CABANG DINAS WILAYAH II MANADO, MINAHASA UTARA DAN BITUNG KELAS A			2	2				1	3			4	6
66	CABANG DINAS WILAYAH III BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR, BOLAANG MONGONDOW SELATAN DAN KOTAMOBAGU			7	7					5	1		6	13
67	CABANG DINAS WILAYAH IV SANGIHE, TALAUD DAN SIAU TAGULANDANG BIARO			7	7					1	2		3	10
68	DINAS KEHUTANAN DAERAH			30	30			2	1	25	17		45	75
69	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM			4	4					5	1		6	10
70	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT			18	18					45	1		46	64
71	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT II BOLSEL DAN BOLTIM			16	16					35	3		38	54
72	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG UNIT III KEPL. SANGIHE, KEPL. TALAUD, KEPL. SITARO			14	14			2		17			19	33
73	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT IV MODEL POIGAR			11	11					9	2		11	22
74	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT V MINAHASA, TOMOHON, MINAHASA TENGGARA DAN MINAHASA SELATAN			37	37					31	2		33	70
75	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNIT VI MINAHASA UTARA, BITUNG DAN MANADO			13	13					25	1		26	39
76	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN HUTAN RAYA LINTAS KAB/KOTA			10	10					5	1		6	16
77	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH			9	9			6	2	33	7	1	49	58
78	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH I SANGIHE, SIAU TAGULANDANG BIARO DAN TALAUD KELAS A			2	2					2	3		5	7
79	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TUMUMPA				0					8	1		9	9

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN											TOTAL	
		SD	SMP	SMA/ SMK/MA	Total Pendidikan SMA ke bawah	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3		Total Pendidikan Perguruan Tinggi
80	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH II MINAHASA TENGGARA KELAS A			3	3					3	2		5	8
81	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN BITUNG			3	3			2		7	3		12	15
82	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH III BITUNG, MINAHASA UTARA, MINAHASA, MINSEL DAN TOMOHON			2	2					3	1		4	6
83	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLA PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH IV BOLMONG, KOTAMOBAGU, BOLMUT, BOLSEL DAN BOLTIM	1		3	4					5			5	9
84	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PEMBIHIAN DAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN			6	6					6	1		7	13
85	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN DAERAH	1		39	40				5	3	68	23	99	139
86	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN TEKNIS PERTANIAN			4	4			1	1	4	5	1	12	16
87	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN BIBIT TERNAK DAN BENIH PERTANIAN			5	5			1		10	1		12	17
88	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			3	3					6	1		7	10
89	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2		14	16			1		22	9		32	48
90	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERLINDUNGAN DAN PENGUJIAN MUTU TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	5		17	22			1		40	10	1	52	74
91	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH			22	22			11	7	89	18		125	147
92	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			5	5			4	1	17	1		23	28
93	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BINA TEKNIK				0			4		13	6		23	23
94	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM			6	6			2		8	1		11	17
95	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINAHASA UTARA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN, BITUNG DAN TOMOHON			4	4			7		15	2		24	28
96	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH II BOLMONG, BOLMONG UTARA, BOLMONG TIMUR, BOLMONG SELATAN DAN KOTAMOBAGU			12	12			6		8			14	26
97	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE			3	3			1	1	7			9	12
98	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH WILAYAH IV KEPULAUAN TALAUD				0					9	2		11	11
99	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN			3	3			1		8			9	12
100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH			2	2	1	1	2	5	14	8		30	32

NO.	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN											TOTAL	
		SD	SMP	SMA/ SMK/MA	Total Pendidikan SMA ke bawah	D-I	D-II	D-III	D-IV	S1	S2	S3		Total Pendidikan Perguruan Tinggi
101	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KELAS A		1	1	2			2		3	1		6	8
102	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH			14	14				2	14	4		20	34
103	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM KELAS A			9	9					5	4		9	18
104	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH			7	7				2	21	12		35	42
105	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		1	2	3			1		4			5	8
106	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH			9	9			4	4	27	14		49	58
107	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN			2	2			1		4	4		9	11
108	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH			11	11		1	6	4	28	5		44	55
109	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KELAS A			19	19			1		18	2		21	40
110	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH			6	6			2	1	25	9		37	43
111	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG			3	3					8	1		9	12
112	DINAS PERKEBUNAN DAERAH			22	22			2	2	29	8		41	63
113	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN			7	7					7	1		8	15
114	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENGUJIAN, PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN		3	7	10					4			4	14
115	DINAS SOSIAL DAERAH			7	7			8	6	29	4	1	48	55
116	UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA SENJA CERAH			2	2			5		10	2		17	19
117	UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI PELAYANAN SOSIAL ANAK REMAJA MAKAARUYEN			1	1			2	1	8	2		13	14
118	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	1		5	6	1		4	5	31	20		61	67
119	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA KELAS A			2	2			1		19	1		21	23
120	UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PELATIHAN TENAGA KERJA			1	1			1		7			8	9
121	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH		1	45	46			1	5	29	2		37	83
TOTAL		2	21	1161	1184	9	14	875	357	8617	1241	23	11136	12320

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sult

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Tahun 2022 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan kedua Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan kedua Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah Tahun 2023, terfokus pada pencapaian Target Pendapatan Daerah (PATDA) sebesar Rp.3.937.495.597.596,- dengan Pencapaian Realisasai Pendapatan Daerah (PATDA) sebesar Rp.3.538.185.274.966,21.- (89,86%); yang terdiri dari PAD Target sebesar Rp.1.624.996.697.596,- realisasi Rp.1.460.744.817.777,21.- (89,85%); Pendapatan Transfer Target Rp.2.310.241.946.000,- realisasi Rp.2.076.188.476.387.- (89,87%); Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, Target Rp.2.256.954.000,-, realisasi Rp. 1.251.980.802.- (55,47%). Seperti yang digambarkan pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.10: Capaian Realisasi Penerimaan terhadap Target Pendapatan Daerah (PATDA) Tahun Anggaran 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	TARGET PERUBAHAN
	(Rp)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.624.996.697.596	1.460.744.817.777,21	89,89
PENDAPATAN TRANSFER	2.310.241.946.000	2.076.188.476.387,00	89,87
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	2.256.954.000	1.251.980.802,00	55,47
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.937.495.597.596	3.538.185.274.966,21	89,86

Sumber Data: BKAD Prov. Sulut

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selang Periode Tahun 2023 dinilai belum mencapai target 100% yang ditetapkan dalam APBD untuk mencapai sasarannya, hal ini dibuktikan dari pencapaian Realisasi

terhadap Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dimana realisasi mencapai Rp. 1.460.744.817.777,21,- atau 89,89% dari target sebesar Rp.1.624.996.697.596,-, seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.11: Target dan Realisasi PAD Tahun 2023

JENIS PAD	TARGET	REALISASI	(%)
	(Rp)	(Rp)	
PAJAK DAERAH	1.261.561.118.499,00	1.186.354.255.171,27	94,04
RETRIBUSI DAERAH	257.005.455.233,00	171.202.529.811,00	66,69
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	70.817.711.445,00	70.918.058.953,00	100,14
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	35.612.412.419,00	32.269.973.841,94	88,03
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.624.996.697.596,00	1.460.744.817.777,21	89,89

Sumber Data: BKAD Prov. Sulut

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) dan dana Insentif Daerah (DID). Untuk Pendapatan Transfer dimana target Tahun 2023 sebesar Rp.2.310.241.946.000,00,- dengan realisasi mencapai Rp.2.076.661.998.241,00,- atau 89,87%. Untuk lebih jelasnya terkait Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023, diuraikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.12 : Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023

JENIS PENDAPATAN	TARGET INDUK	REALISASI	(%)
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.310.241.946.000,00	2.076.661.998.241,00	89,87
- Dana Perimbangan	2.276.662.650.000,00	2.042.609.180.387,00	89,72
- Dana Insentif Daerah (DID)	33.579.296.000,00	33.579.296.000,00	100
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.310.241.946.000,00	2.076.188.476.387,00	89,87

Sumber Data: BKAD Prov. Sulut

c) Lain-lain Pendapatan Daerah (PATDA) yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah (PATDA) yang Sah untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.13 : Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)
	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN HIBAH	2.256.954.000,00	1.251.980.802,00	55,47
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.256.954.000,00	1.251.980.802,00	55,47

Sumber Data: BKAD Prov. Sulut

2) Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023, untuk Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 3.813.842.299.943,- dengan realisasi mencapai Rp. 3.227.157.620.513,00,- atau 84,62%. Untuk lebih lanjut terkait Realisasi Anggaran Belanja Daerah dapat dilihat pada uraian table dibawah ini:

Tabel 1.14: Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	3.813.842.299.943,00	3,358.663.215.088,00	88,07
BELANJA OPERASI	2.625.593.260.278,00	2.331.624.377.273,00	88,80
Belanja Pegawai	1.394.997.822.038,00	1.204.327.865.998,00	86,33
Belanja Barang dan Jasa	971.090.069.289,00	906.534.798.730,00	93,35
Belanja Bunga	44.051.278.562,00	16,194,564,352,00	36,76
Belanja Subsidi	13.301.450.000,00	13,293,237,126,00	99,94
Belanja Hibah	201.094.108.307,00	190.226.012.667,00	94,60
Belanja Bantuan Sosial	1.058.532.082,00	1,047,898,400,00	99,00
BELANJA MODAL	457.968.194.233,00	423.879.478.944,00	92,56
Belanja Modal Tanah	37.336.176.576,00	36,218,106,608,00	97,01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.225.511.755,00	165.792.109.225,00	96,83
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.471.074.670,00	110.419.926.917,00	83,99
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.841.522.708,00	90,808,712,427,00	90,95
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.093.908.524,00	20.640.623.767,00	114,07
BELANJA TIDAK TERDUGA	8.008.656.098,00	371.182.409,00	4,63
Belanja Tidak Terduga	8.008.656.098,00	371.182.409,00	4,63
BELANJA TRANSFER	722.272.189.334,00	602.788.176.462,00	83,46
Belanja Bagi Hasil	717.272.189.334,00	597.788.176.462,00	83,34
Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100
SURPLUS / (DEFISIT)	123.653.297.653,00	176.522.059.878,21	145,18

Sumber Data: BKAD Prov. Sulut

3) Pembiayaan Daerah

Tabel 1.15: Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2022	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	230.389.328.039,00	0,00	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	230.389.328.039,00	0,00	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	354.042.625.692,00	156.790.040.664,00	44,29
Penyertaan Modal Daerah	62.000.000.000,00	50.000.000.000,00	80,65
Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	292.042.625.692,00	106.790.040.664,00	36,57
PEMBIAYAAN NETTO	(123.653.297.653,00)	(156.790.040.664,00)	126,80

Sumber Data: BKAD Prov. Sulut

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pembangunan daerah bagian dari upaya mewujudkan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya menunjukkan adanya gap antara capaian indikator pembangunan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, capaian beberapa indikator pembangunan juga menunjukkan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kenyataan ini menjadi dasar dalam penentuan berbagai permasalahan yang perlu ditindak lanjuti pada perencanaan pembangunan daerah ke depan. Secara garis besar permasalahan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dapat dijabarkan menurut:

- 1) Aspek Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial
 - a) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
 - b) Masih tingginya angka stunting, penderita demam berdarah dan TBC.
 - c) Masih kurangnya penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas, lansia, anak dan perempuan.
 - d) Masih tingginya jumlah penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota
 - e) Belum optimalnya pengelolaan drainase.
 - f) Masih tingginya gap capaian akses air minum layak, sanitasi layak, serta permukiman layak huni dan berkelanjutan
- 2) Aspek Lingkungan Hidup
 - a) Rendahnya tutupan lahan, khususnya di Kawasan perkotaan.
 - b) Masih tingginya perambahan hutan.
 - c) Meningkatnya intensitas kejadian banjir dan longsor.
 - d) Masih tingginya pencemaran air permukaan.
 - e) Belum optimalnya pengelolaan sampah.
 - f) Belum optimalnya pengelolaan limbah B3.
- 3) Aspek Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan
 - a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi.
 - b) Tingginya angka pengangguran.
 - c) Tingkat inflasi yang sangat fluktuatif.
 - d) Belum optimalnya pengelolaan industri pariwisata.
 - e) Rendahnya daya saing UMKM dan IKM.
 - f) Rendahnya produktivitas beberapa komoditi unggulan daerah (kelapa, cengkih, pala dan produk perikanan).
 - g) Rendahnya sumber pangan hewani.
 - h) Rendahnya produktivitas tanaman pangan.
- 4) Aspek Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - a) Ketersediaan infrastruktur wilayah (jalan, listrik, air minum, sanitasi dan telekomunikasi) belum merata.

- b) Transformasi energi belum terpadu dan berkelanjutan.
 - c) Masih tingginya angka *backlog* perumahan.
 - d) Infrastruktur konektivitas antar daerah, kepulauan dan daratan belum sepenuhnya terintegrasi.
 - e) Belum terwujudnya kebijakan Satu Peta di Provinsi Sulawesi Utara.
- 5) Aspek Hukum dan Tata Kelola
- a) Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.
 - b) Kurangnya inovasi pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - c) Lemahnya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Permasalahan pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2023, maka di rumus Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Penguatan Ekonomi melalui industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa;
- 2) Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM, Pemajuan Kebudayaan dan Revolusi Mental;
- 3) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- 4) Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan;
- 5) Peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan serta distribusi pangan yang terdiversifikasi;
- 6) Peningkatan kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan;
- 7) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; dan
- 8) Penguatan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Gerakan pembangunan daerah di Sulawesi Utara pada Tahun 2021- 2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta basional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

1) Visi

Visi pembangunan Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2016 yaitu:

***"Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera
sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik"***

Visi ini terdiri dari 3 (tiga) kata dan/atau kalimat kunci yaitu:

- a) Maju;***
- b) Sejahtera;***
- c) Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.***

Visi 2021-2026 ini mengacu pada Visi Nasional dalam RPJMN (tegak lurus) dan arahan tahapan pelaksanaan untuk pencapaian Visi Pembangunan Sulawesi Utara dalam RPJPD 2005-2025. Dalam konteks pembangunan Sulawesi Utara, Visi ini menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Aktualisasi pokok-pokok visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Maju

Ukuran "*Maju*" ditunjukkan oleh:

- a) Kemampuan untuk menjamin Pemberdayaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pariwisata dan jasa Sebagai Sumber Ketahanan Ekonomi daerah.
- b) Kemampuan untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan pembiayaan pembangunan dan mengoptimalkan belanja daerah bersumber dari sumber daya lokal sehingga mengurangi ketergantungan sumber daya dari luar daerah.
- c) Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan kemajuan IPTEK/Digitalisasi dalam berbagai bidang.
- d) Memiliki Litbang yang handal.
- e) Terbentuknya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental.

Sejahtera

Ukuran "*Sejahtera*" ditunjukkan oleh:

- a) Kemampuan menanggulangi kemiskinan, pengangguran serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b) Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing.
- c) Kemampuan beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19.

Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik

Ukuran "*Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik*" ditunjukkan oleh:

- a) Kesiapan untuk membangun sarana, prasarana, infrastruktur dan konektivitas yang merata dan berkeadilan dalam koridor ketahanan lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.
- b) Pelabuhan Hub Internasional Bitung sebagai pintu ekspor/impor ke Asia dan Pasifik.
- c) Kesiapan kebijakan, sumberdaya manusia sebagai tujuan wisata dunia, tujuan MICE (Meeting, Incentives, Conference and Exhibition), tujuan studi, pengembangan ilmu dan teknologi.
- d) Kemampuan pemerintah membangun jaringan kerjasama regional, bilateral dan internasional untuk mendukung peningkatan kemampuan daerah.
- e) Implementasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2) Misi

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, telah dirumuskan Misi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Sulawesi Utara. Misi Pembangunan Sulawesi Utara 2021-2026 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara;
- b) Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa;
- c) Pembangunan Infrastruktur dan Perluasan Konektivitas;
- d) Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan;
- e) Pemerintahan yang Baik dan Bersih didukung oleh Sinergitas antar Daerah.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah Sulawesi Utara lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sulawesi Utara tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.16: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Kualitas Manusia Sulawesi Utara	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter	Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,93	72,93	73	74	75	76	77	77
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	94,53	94,53	94,6	94,65	94,7	94,75	94,8	94,8
			Prevalensi Stunting	%	21,2	21,2	16,2	15	14	13	12	12
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	56,02	56,32	57,28	58,06	59,28	59,52	60,10	60,10
Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	(0,99)	(0,99)*	4,5-5,5	5,0-5,7	5,7-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	6,5-7,0
			Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka	0,367	0,367	0,360	0,355	0,350	0,345	0,340	0,340
			Persentasi Angka Kemiskinan	%	7,62	7,78	7,5-6,9	5,93	5,65	5,37	5,09	5,09
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,37	7,28 (Maret)	6,47-7,18	6,00-6,50	5,50-6,00	5,00-5,50	4,50-5,00	4,50-5,00
Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas	Terbangunnya Infrastruktur dan konektivitas yang memadai	Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas	Indeks Infrastruktur	Angka	0,880	0,880	0,885	0,89	0,895	0,90	0,90	0,90
Pembangunan Daerah yang berkelanjutan	Terwujudnya Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang.	Angka	0,53	0,53	0,60	0,68	0,77	0,86	0,95	0,95
			Indeks kualitas lingkungan hidup.	Angka	70,51	70,51	70,81	71,11	71,41	71,71	72,01	72,01
			Akses Air Minum Layak	%	90	90	92	94	96	98	100	100
			Akses Sanitasi Layak	%	82	83	85	87	89	91	93	93
Pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh Sinergitas Antar Daerah	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Kualifikasi Penilaian									
			Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,51	57,48	59,95	61,00	62,50	64,00	65,00	65,00
			Indeks SPBE	Angka	n/a	2,8	3,0	3,3	3,6	4,0	4,5	4,5

Sumber Data: BAPPEDA Prov. Sulut

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program Pembangunan Daerah merupakan instrument pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang telah dijabarkan ke dalam Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Daerah. Program Pembangunan Daerah menempati posisi strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena melalui Program pembangunan Daerah, pemenuhan target sasaran serta Indikator Kinerja Utama akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 Program Pemerintah Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah program yang mendukung Visi dan Misi Pembangunan Sulawesi Utara sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.17: program yang mendukung Visi dan Misi Pembangunan Sulawesi Utara

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
MISI 1 : PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA SULAWESI UTARA		
TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA YAITU SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT DAN CERDAS, ADAPTIF, INOVATIF, TERAMPIL, DAN BERKARAKTER		
SASARAN : Meningkatkan Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia		
Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
20	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
21	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
22	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
23	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
24	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
25	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Prov. Sulut
27	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
28	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
30	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
31	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Prov. Sulut
32	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut
34	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
35	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
36	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
37	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
38	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dinas Kebudayaan Daerah Prov. Sulut
39	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
40	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
41	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
42	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
43	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Sulut
44	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
45	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
47	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
48	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov. Sulut
MISI 2: Penguatan Ekonomi yang Bertumpu pada Industri Pertanian, Perikanan, Pariwisata dan Jasa		
TUJUAN : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas		
SASARAN: Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat		
Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pangan Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
20	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
21	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut
24	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
25	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
26	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
27	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
28	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
29	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Prov. Sulut
30	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
32	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
33	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
34	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Prov. Sulut
35	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
36	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
37	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
38	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata Daerah Prov. Sulut
39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
		Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
40	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
		Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
41	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
42	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
		Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
43	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
44	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Prov. Sulut
		Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulut
45	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
46	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
47	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
48	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
49	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
50	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Perindustrian dan

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Perdagangan Daerah Prov. Sulut
51	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
52	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
53	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
54	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
55	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulut
56	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
57	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
58	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Prov. Sulut
MISI 3: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS		
TUJUAN: TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS YANG MEMADAI		
SASARAN: Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas		
Meningkatnya Infrastruktur Dan Konektivitas		
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
18	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
20	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan
21	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan
22	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov. Sulut
MISI 4: PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN		
TUJUAN: TERWUJUDNYA PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN		
SASARAN: Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan		
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulut
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov. Sulut
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Kehutanan Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
20	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
21	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Prov. Sulut
MISI 5: PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH		
TUJUAN: MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
SASARAN: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		
Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		
1	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sulut
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Sulut
3	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Prov. Sulut
4	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulut
5	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Prov. Sulut
6	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Prov. Sulut
7	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Sulut
8	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Sulut
9	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
10	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sulut
11	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
12	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulut
13	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulut
14	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulut
15	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Prov. Sulut
16	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulut
17	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah Prov. Sulut
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah Prov. Sulut
19	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah Prov. Sulut

Sumber Data: BAPPEDA Prov. Sulut

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2023 **"Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas serta Berwawasan Lingkungan"**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2023, sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia;
- 2) Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat;
- 3) Meningkatnya Infrastruktur dan Konektivitas;
- 4) Meningkatnya Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- 5) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut maka disusunlah Program dan Kegiatan sesuai dengan yang tercantum pada RKPD Tahun 2023 sebagaimana terjabarkan di tabel berikut:

Tabel 1.18: Program dan Kegiatan sesuai dengan yang tercantum pada RKPD Tahun 2023

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
3	Pengelolaan Pendidikan Khusus
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
2	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
2	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
4 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	
1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
1	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
2	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
4	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
5	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
2	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	
6 DINAS KEHUTANAN	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
1	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
3	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
4	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
2	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
8 DINAS SOSIAL	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
6	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant
4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provins
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
9 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
1	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
3	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
2	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
3	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
11 DINAS PANGAN	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
3	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
1	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
2	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
13 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
3	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
1	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
1	Penyediaan Profil Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
PROGRAM PENATAAN DESA	
1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
1	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
1	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
15 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
3	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
4	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain
5	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
6	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK
3	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
5	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
16 DINAS PERHUBUNGAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
1	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
2	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
1	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
17 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
18 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
19 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
20 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
1	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
1	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
1	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
1	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
20 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
22 DINAS KEBUDAYAAN	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
1	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
3	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
1	Pengelolaan Museum Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
23 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
3	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
1	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
25 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
1	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
2	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
2	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
4	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil
5	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
7	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
8	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
9	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
11	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 55,000,000 142,000,000
2	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
3	Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
4	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50,000,000 55,000,000
5	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
6	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
2	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
1	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 105,000,000 180,000,000
2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 647,000,000 620,000,000
3	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 110,000,000 190,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
26 DINAS PARIWISATA	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
27 DINAS PERTANIAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
3	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
4	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
1	Penataan Prasarana Pertanian
2	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
3	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
1	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
4	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
5	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
28 DINAS PERKEBUNAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
1	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
1	Penataan Prasarana Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
1	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	
29 DINAS KEHUTANAN	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
2	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
8	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi
9	Perbenihan Tanaman Hutan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
1	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
2	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
30 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
1	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
1	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut
2	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat
3	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	
1	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
3	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
31 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
1	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
1	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
32 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
33 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
2	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
2	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
34 SEKRETARIAT DAERAH	
SEKRETARIAT DAERAH	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
2	Fasilitasi Keprotokolan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
2	Pelaksanaan Otonomi Daerah
3	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
2	Fasilitasi Bantuan Hukum
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	
1	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
35	SEKRETARIAT DPRD
	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1	Fasilitasi Keprotokolan
2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
3	Layanan Administrasi DPRD
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4	Peningkatan Kapasitas DPRD
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7	Pembahasan Kerja Sama Daerah
8	Fasilitasi Tugas DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	
36	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KEUANGAN	
37	BADAN PENDAPATAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
38	BADAN KEUANGAN DAN ASET
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
KEPEGAWAIAN	
39	BADAN KEPEGAWAIAN
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2	Mutasi dan Promosi ASN
3	Pengembangan Kompetensi ASN
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
40	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	Pengembangan Kompetensi Teknis
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
41	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
PENGELOLAAN PERBATASAN	
42	BADAN PENGELOLA PERBATASAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	
1	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama
2	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
3	Monitoring dan Evaluasi
43 BADAN PENGHUBUNG	
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT	
46 INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2	Pendampingan dan Asistensi
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
47 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber Data: BAPPEDA Prov. Sulut

3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- Standar Pelayanan Minimal Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- a. Pasal 1 Ayat 17: Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal**.
 - b. Pasal 12 Ayat 1: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - 1) Pendidikan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 5) Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 6) Sosial.
 - c. Pasal 18 Ayat 1: Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

- d. Pasal 18 Ayat 2: Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**
- e. Pasal 298 Ayat 1: **Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar** yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Lebih lanjut pengaturan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan tersebut diatur melalui PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal dan Penerapannya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pedoman teknis masing-masing pelaksanaan masing-masing urusan Pemerintahan diatur melalui:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum penerapan SPM termasuk pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah secara keseluruhan pada Dokumen RPJMD 2021-2026 yang ditetapkan pada tahun 2021. Sehingga sinkronisasi muatan SPM pada RPJMD baru dapat dilaksanakan pada tahun 2022. Secara substansi penyesuaian indikator penerapan SPM pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2018-2021, mengacu pada pedoman teknis dan target pencapaian seluruh jenis layanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyesuaian lainnya mengarah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana SPM, dimana target capaian SPM menjadi bagian dari target kinerja program dan anggaran yang lebih lanjut menjadi dokumen kinerja yang diperjanjikan oleh masing-masing kepala Perangkat daerah pelaksana SPM setiap tahunnya.

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026. Sebagaimana Visi Kepala Daerah yakni "Sulawesi Utara Maju, dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik", penitik beratan kebijakan umum terkait dengan upaya pemenuhan SPM dapat terlihat dalam pemahaman atas Visi dan Misi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya.

Sinkronisasi Misi Pembangunan Daerah dengan standar teknis pelayanan SPM dari Kementerian teknis masing-masing urusan sebagai berikut:

- 1) SPM Pendidikan sinkron/selaras dengan Misi Nomor 1;
- 2) SPM Kesehatan sinkron/selaras dengan Misi Nomor 1;
- 3) SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sinkron/selaras dengan Misi Nomor 3 dan 4;
- 4) SPM Perumahan Rakyat sinkron/selaras dengan Misi Nomor 3 dan 4;
- 5) SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sinkron/selaras dengan Misi Nomor 5;
- 6) SPM Sosial sinkron/selaras dengan Misi Nomor 1.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penerapan SPM yaitu:

- 1) Mengintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) maupun tahunan (RKPD);
- 2) Mengesahkan Keputusan Gubernur Nomor 261 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Menyusun pembiayaan perencanaan anggaran dalam APBD;
- 4) Mengalokasikan prioritas anggaran bagi penerapan SPM;
- 5) Melaksanakan SPM sesuai standar yang disusun Pemerintah Pusat;
- 6) Aktif melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota melalui dinas teknis pengampu urusan dan Perangkat Daerah Terkait lainnya;
- 7) Melaporkan capaian penerapan SPM kepada Pemerintah Pusat.

Sebagaimana telah ditetapkannya maka SPM berorientasi pada Tugas dan Tanggung Jawab Tim yaitu:

- 1) mengoordinasikan rencana aksi Penerapan dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan provinsi;
- 2) melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
- 3) melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
- 4) mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- 5) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- 6) mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- 7) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;

- 8) mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 9) mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- 10) melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- 11) menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- 12) mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- 13) melakukan rapat secara berkala; dan
- 14) melaporkan Penerapan SPM kepada secretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.